

## **BAB IV**

### **UPAYA INDONESIA MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR**

Tragedi kemanusiaan yang menimpa komunitas muslim Rohingya yang telah menetap di wilayah negara bagian Rakhine telah menarik perhatian masyarakat internasional, salah satunya negara Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi kepeduliannya terhadap hak-hak asasi manusia atau HAM. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine telah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM yakni tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh militer Myanmar maupun masyarakat etnis lainnya terhadap masyarakat etnis Rohingya seperti pembakaran hidup-hidup, pemerkosaan terhadap wanita-wanita Rohingya, penganiayaan, dan penangkapan paksa yang berujung pada kematian. Pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine membuat negara Indonesia baik itu pemerintahan dan masyarakatnya mengancam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap masyarakat Rohingya. Sebagai negara yang mengedepankan hak-hak kemanusiaan dan menganut prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif, Indonesia berusaha untuk aktif membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine baik itu melalui bantuan-bantuan terhadap korban tragedi kemanusiaan maupun langkah-langkah diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Myanmar.

#### **A. Jalur Diplomasi**

Indonesia dan Myanmar telah menjalin hubungan diplomatik selama kurun waktu 71 tahun, yaitu sejak

dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara pada tahun 1947. Indonesia dan Myanmar merupakan dua negara yang memiliki kesamaan di beberapa aspek seperti sama-sama memiliki kesamaan dalam perjuangan terlepas dari jajahan bangsa asing, dan kedua negara juga memiliki kesamaan dalam hal keberagaman etnis. Adanya kesamaan di beberapa aspek membuat negara Indonesia dan Myanmar memiliki hubungan baik, terlebih lagi atas dukungan Myanmar yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia di tahun 1945. Hubungan baik yang dibina oleh kedua negara dipererat lagi dengan ditempatkannya perwakilan negara atau duta besar di masing-masing negara. Sejak kepemimpinan Soekarno Hatta, kedua negara telah membina hubungan baik dan mulai menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, militer, ekonomi, pertanian, dan infrastruktur pada tahun 1966.<sup>1</sup> Sejarah hubungan baik antara negara Indonesia dan Myanmar dapat dijadikan peluang ataupun dasar untuk Indonesia dalam membantu penyelesaian tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Rohingya yang berada di wilayah negara bagian Rakhine.

Upaya pemerintah Indonesia dalam membantu mengatasi permasalahan di wilayah negara bagian Rakhine melalui langkah-langkah diplomasi yang lebih menekankan pada *soft diplomacy* dalam pelaksanaannya. Melalui *soft diplomacy* atau diplomasi lunak, negara dapat melakukan banyak hal seperti melakukan diplomasi multilateral atau bilateral, dan turut aktif dalam perdamaian dunia. *Soft diplomacy* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lebih menekankan pada dialog-dialog baik itu di forum-forum internasional maupun kunjungan langsung, selain itu pemerintah Indonesia juga lebih berusaha untuk mengajak aktor-aktor lain baik itu negara ataupun individu untuk bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan krisis

---

<sup>1</sup> *Hubungan RI - Myanmar Sepanjang Masa*. (2007, January 21). Retrieved February 25, 2018, from Kedutaan Besar Republik Indonesia: [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)

kemanusiaan di wilayah negara bagian Rakhine. Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menggunakan *soft diplomacy* daripada *hard diplomacy* karena pemerintah Indonesia yakin bahwa penyelesaian konflik di wilayah negara bagian Rakhine tidak dapat diatasi hanya dengan aksi-aksi keras seperti kecaman, tindakan ancaman, bahkan sampai tindakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Hal tersebut justru membuat pemerintah Indonesia semakin sulit untuk mendekati pihak Myanmar untuk memberikan solusi atas penyelesaian konflik di wilayah negara bagian Rakhine atau bahkan dihindari oleh pihak Myanmar jika sikap pemerintah Indonesia dinilai terlalu ekstrim dan keras. Pendekatan terhadap pemerintah Myanmar melalui jalan *soft diplomacy* dianggap sebagai langkah yang aman dan baik demi menjaga hubungan yang sudah dibina oleh kedua negara yakni Indonesia dan Myanmar selama kurun waktu 71 tahun. .

Langkah-langkah *soft diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pemerintah Myanmar terkait memberikan solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine sudah dilaksanakan semenjak meletusnya kembali konflik antar etnis Rakhine dan etnis Rohingya pada tahun 2012 yang mengakibatkan ratusan warga baik itu etnis Rohingya maupun etnis Rakhine menjadi korban atas tragedi tersebut. Di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia mencoba untuk menawarkan bantuannya melalui surat yang dikirim oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada pemimpin Myanmar pada saat itu yakni Presiden Thein Sein. Pengiriman surat tersebut memiliki maksud untuk meminta pemerintah Myanmar agar menerima pengamat internasional untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine, dan pemerintah Indonesia juga menawarkan bantuan untuk mengatasi permasalahan di wilayah negara bagian Rakhine dengan mengirimkan ahli penyelesaian konflik komunal yaitu Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden negara Republik Indonesia

pada masa itu, Jusuf Kalla sendiri telah diakui sebagai tokoh yang pernah menjadi mediator serta berpengalaman menangani masalah konflik dan perundingan damai di beberapa wilayah di dalam negeri seperti konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, dan Poso. Di bulan September 2012, Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan kunjungan ke Myanmar dan mengadakan perjanjian kerjasama antara Palang Merah Indonesia (PMI) dan otoritas Myanmar terkait pengiriman bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan serta membicarakan tentang rencana rekonstruksi paska konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Dari hasil pertemuan itu tercipta disetujuinya kerjasama dengan PMI yang memberikan dampak positif yaitu PMI dapat mengirim bantuan-bantuan ke lokasi yang sedang berkonflik ataupun yang terkena dampak dari konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine.

Dalam berbagai forum internasional seperti PBB, ASEAN, dan OKI pemerintah Indonesia selalu menyinggung dan berusaha agar tragedi kemanusiaan di Myanmar menjadi topik pembahasan. Seperti pada saat pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dihadiri oleh perwakilan Indonesia yaitu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IV Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Mekkah, Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa berkesempatan untuk membahas tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa meminta OKI untuk dapat terlibat dan berperan lebih aktif dalam penyelesaian konflik yang menimpa masyarakat etnis Rohingya, dan meminta OKI untuk menetapkan agenda serta langkah-langkah konkret dan nyata untuk mendorong penyelesaian dalam konflik yang terjadi di wilayah negara

bagian Rakhine. Dari perundingan yang telah dilakukan dalam forum OKI dihasilkan beberapa keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan tim khusus dari OKI yang memiliki tugas pokok untuk mendorong agar dihentikannya tindak kekerasan di wilayah negara bagian Rakhine dan untuk memperjuangkan status warga negara bagi masyarakat etnis Rohingya yang telah menetap di Myanmar. Realisasi dari pembentukan tim khusus OKI, diteruskan dengan terciptanya kesepakatan kerjasama antara pihak OKI dan pemerintah Myanmar untuk menempatkan tim khusus OKI di wilayah Myanmar dalam menangani permasalahan yang terjadi. Kesepakatan kerjasama telah disetujui oleh kedua pihak, bahkan telah dibuat tempat yaitu kantor resmi di Myanmar yang khusus untuk mengurus masalah kemanusiaan oleh tim OKI. Namun menjelang peresmian kantor tersebut, kesepakatan kerjasama berakhir batal yang disebabkan oleh penolakan dari masyarakat Myanmar atas berdirinya kantor resmi untuk tim khusus OKI dalam menangani masalah kemanusiaan. Masyarakat yang menolak sempat melakukan aksi demo dan blokade akses ke kantor tersebut, yang membuat pemerintah Myanmar memutuskan untuk membantalkan kesepakatan kerjasama yang telah dilakukan dengan pihak OKI. Pembatalan kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Myanmar sangat disayangkan mengingat tujuan dari kerjasama tersebut adalah agar peran OKI lebih aktif dalam penangan konflik di wilayah negara bagian Rakhine. Pemutusan kesepakatan membuat pihak OKI hanya dapat memberikan bantuan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) yang memang sudah mendapatkan akses ijin dari pemerintah Myanmar untuk berada di kawasan yang berkonflik.

Di tahun 2012 saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine baik itu melalui kesepakatan kerjasama dan kunjungan langsung maupun usaha pemerintah Indonesia untuk selalu membawa topik tragedi kemanusiaan di

Rakhine sebagai topik pembahasan di forum-forum internasional seperti PBB, ASEAN, dan OKI. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia sudah berperan aktif dalam membantu penyelesaian konflik di wilayah negara bagian Rakhine, namun itu semua belum cukup. Upaya langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dilanjutkan oleh pemerintahan presiden selanjutnya, yaitu Presiden Joko Widodo.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine semakin memanas dan memunculkan permasalahan baru yaitu lahirnya kelompok ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) yang menyerang kepolisian Myanmar yang menimbulkan serangan balasan dari tentara Myanmar dan mengakibatkan terjadinya “operasi pembersihan” terhadap komunitas muslim Rohingya di wilayah negara bagian Myanmar. Atas kejadian tersebut, semakin banyak masyarakat etnis Rohingya yang memilih untuk meninggalkan wilayah Myanmar demi terhindar dari konflik dan mencari tempat perlindungan di wilayah negara lainnya seperti negara tetangga Bangladesh. Sikap pemerintah Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Myanmar yaitu sangat menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi dan melalui kementerian luar negeri, Indonesia berupaya untuk melanjutkan misi-misi diplomatik yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk membantu penyelesaian di Myanmar.

Pada bulan September 2016 terkait tanggapan pemerintah Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di istana negara, memberikan beberapa pernyataan yaitu :

1. Menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine,

2. Mendorong aksi nyata dalam penyelesaian konflik dan bukan hanya sekedar ucapan belaka seperti melayangkan ancaman ataupun kecaman terhadap Myanmar,
3. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus membantu atasi krisis kemanusiaan, dan juga dengan bantuan dukungan baik itu dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, serta
4. Menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretaris Jenderal PBB dan komisi penasihat khusus Rakhine State untuk membahas mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 silam, pemerintah Indonesia akan terus berkontribusi aktif dalam membantu menemukan solusi penyelesaian untuk tragedi kemanusiaan yang telah terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Langkah pertama yang diambil oleh Presiden Joko Widodo yakni menugaskan menteri luar negeri Retno Marsudi untuk menjalankan misi diplomatik.

Melalui kementerian luar negeri Republik Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk menggunakan jalur diplomasi dalam membantu mengatasi tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Sehubungan dengan penugasan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk terus melaksanakan misi diplomatik di Myanmar, pada 6 Desember 2016 menteri luar negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar. Kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kali ini membawa amanat dari Presiden Joko Widodo untuk membahas solusi penyelesaian konflik di Myanmar. Pertemuan yang diadakan di ibu kota Myanmar yakni Naypyidaw, dihadiri oleh Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan bersenjata Myanmar Jendral U Min Aung Hlaing, dan pertemuan ini

membahas mengenai solusi penyelesaian untuk tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Pihak Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan usulan solusi yang dikenal dengan sebutan “Formula 4+1”. Solusi “Formula 4+1” ini mencakup strategi-strategi melalui pendekatan seperti<sup>2</sup> :

1. Pengembalian Stabilitas dan Keamanan

Menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas untuk mewujudkan upaya pembangunan yang inklusif. Memulihkan keamanan di wilayah Myanmar khususnya yang menjadi lokasi konflik untuk mencegah munambahnya korban dan untuk mengembalikan situasi yang normal tanpa adanya tindak kekerasan ataupun sikap permusuhan.

2. Menahan Diri Secara Maksimal dan Tidak Menggunakan Kekerasan

Semua pihak yang terlibat dalam konflik di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar diharapkan untuk meredam emosi dan menghentikantindak kekerasan yang dilakukan, baik itu dari pihak militer Myanmar maupun kelompok-kelompok gerilyawan lainnya seperti ARSA dan masyarakat dari berbagai etnis. Himbuan dan harapan dari pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan kekerasan terhadap etnis Rohingya dengan segera.

3. Perlindungan Kepada Semua Orang Tanpa Memandang Status Etnis dan Agama

Menegaskan kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap semua tanpa kecuali, yakni harapan agar pemerintah Myanmar tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM untuk semua kalangan masyarakat baik itu etnis mayoritas

---

<sup>2</sup> *Menu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar.* (2017, September 04). Retrieved February 25, 2018, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)

maupun etnis minoritas yang berada di wilayah Myanmar, dan juga menekankan pada inklusivitas, yakni sikap toleransi atau penekanan terhadap masyarakat bahwa semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa komunitas muslim Rohingya di wilayah negara bagian Rakhine.

4. Memprioritaskan pentingnya pembukaan akses bagi bantuan kemanusiaan

Menekankan pada pentingnya akses langsung bantuan, yakni menegaskan kepada pemerintah Myanmar untuk lebih memudahkan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkena dampak konflik.<sup>3</sup>

Keempat poin utama diatas ialah 4 prioritas utama yang harus segera diwujudkan dalam membantu mengatasi permasalahan di wilayah negara bagian Rakhine. Selain keempat poin tersebut, masih terdapat 1 poin penting yakni :

5. Mengimplementasikan rekomendasi dari mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang termuat dalam Laporan Komisi Penasihat PBB yaitu :
  - 1) Pemerintah Myanmar harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri ditegakkannya segregasi dari Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya.
  - 2) Memastikan akses kemanusiaan melalui negara secara penuh dan tidak dikekang.
  - 3) Mengatasi status kewarganegaraan Rohingya yang tidak bernegara dan meninjau ulang terkait Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982.

---

<sup>3</sup> Pramudito. (2017, February). *Diplomasi Lunak Indonesia terhadap Myanmar*. Retrieved February 25, 2018, from [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

- 4) Menahan pelaku kejahatan yang bertanggungjawab dalam tragedi kekerasan yang melanggar HAM di wilayah negara bagian Rakhine.
- 5) Pelarangan dan pembatasan terhadap aksi-aksi gerakan kemerdekaan.<sup>4</sup>

Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi serta Jendral U Min Aung Hlaing membuahkan hasil yaitu pemerintah Myanmar bersedia berkomitmen untuk mempermudah akses bantuan dan akses luar terhadap negara-negara lainnya untuk turut aktif berkontribusi dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan yang terjadi.

Langkah diplomasi yakni pendekatan *soft diplomacy* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah terbilang tepat mengingat hubungan baik yang dijalin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. *Soft diplomacy* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mulai dari dialog bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi sampai solusi strategis yang disarankan oleh pihak Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sudah diterima kehadirannya dan diberikan ijin untuk masuk ke wilayah Myanmar serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban dari tragedi kemanusiaan di Rakhine. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa negara Indonesia sebagai negara netral dan negara kawan.

---

<sup>4</sup> *Indonesia Urges OIC : Cooperation for Solution to the Myanmar Problem.* (2017, September). Retrieved February 25, 2018, from Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia: [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)

## **B. Pengiriman Bantuan Kemanusiaan**

Setelah meletusnya konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine, pemerintah Indonesia secara bertahap terus memberikan bantuan demi terciptanya perdamaian. Selain menempuh langkah diplomatik dalam menangani permasalahan di Myanmar, Indonesia juga melakukan upaya lainnya untuk membantu para korban yang terkena dampak dari adanya konflik di wilayah negara bagian Rakhine yaitu berupa penyaluran bantuan kemanusiaan, baik itu oleh organisasi masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), maupun individu-individu lainnya.

Sejak tragedi kemanusiaan terjadi di wilayah negara bagian Rakhine, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan terhadap para korban di Myanmar. Melalui Palang Merah Indonesia (PMI), Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkena dampak konflik. Penyaluran bantuan kemanusiaan yang pertama telah dilakukan pada 25 Agustus 2012 yang membawa serta 8 anggota PMI sebagai relawan dan bantuan berupa kebutuhan barang-barang sehari-hari. Dilanjutkan dengan pengiriman bantuan berupa beras sebanyak 10 ton kepada para korban yang tinggal di camp-camp pengungsian di wilayah Myanmar.<sup>5</sup> Penyaluran bantuan kemanusiaan oleh PMI ke korban konflik di wilayah Myanmar merupakan langkah pertama untuk membangun dan menciptakan suasana perdamaian.

Penyaluran bantuan pada tahap pertama ini merupakan sebuah tindak lanjut dari kunjungan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla ke Myanmar dan mengadakan pertemuan dengan

---

<sup>5</sup> Swalt. (2012, November 06). *PMI Bantu 100 Ton Beras Bagi Pengungsi Myanmar*. Retrieved February 25, 2018, from Palang Merah Indonesia: [www.pmi.or.id](http://www.pmi.or.id)

Presiden Myanmar Thein Sein yang membawa misi kemanusiaan. Bantuan yang dikirim berupa paket *hygiene kit* (perlengkapan mandi seperti sabun, shampoo, pasta dan sikat gigi, handuk, dan ember) sebanyak 500 paket, kain sarung sebanyak 50 ribu, dan selimut hangat sebanyak 3 ribu yang dikirim melalui jalur udara dengan pesawat cargo milik Indonesia. Pada Desember 2016, bantuan tahap kedua dari PMI juga telah disalurkan ke wilayah Myanmar yang terkena dampak konflik.<sup>6</sup> Dari pihak Myanmar sendiri yang membantu penerimaan bantuan yakni Palang Merah Myanmar memberikan respon yang baik dan menerima bantuan tersebut dengan tangan terbuka serta berterimakasih atas bantuan yang diterima.

Secara berkala PMI memberikan bantuan baik itu pengiriman relawan maupun tenaga medis, tidak hanya pengiriman tenaga relawan dan bantuan kemanusiaan saja namun PMI dan pemerintah Indonesia juga berencana untuk mendirikan sebuah rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Indonesia. Tepatnya pada September 2017, telah disepakati mengenai rencana pembangunan rumah sakit yang berlokasi di wilayah Mrauk U yang berada di wilayah Rakhine Myanmar. Rumah sakit ini menempati area seluas 8.000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan rumah sakit mencapai 100m<sup>2</sup>. Tahap pertama pembangunan Rumah Sakit Indonesia telah selesai, disusul dengan tahap kedua berupa pembangunan ruang dokter, ruang perawat yang sedang dalam proses pengerjaan. Untuk tahap ketiga, akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung utama rumah sakit. Proses pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Indonesia juga dibantu oleh kontraktor Myanmar dan juga masyarakat Myanmar turut membantu pembangunan Rumah Sakit Indonesia ini. Rumah sakit yang memang dibangun di perbatasan antara wilayah yang dihuni masyarakat Muslim dan masyarakat Buddha, tujuan dari pembangunan rumah sakit ini

---

<sup>6</sup> PMI Berangkatkan Bantuan Sarung Untuk Pengungsi Myanmar. (2012). Retrieved February 25, 2018, from Palang Merah Indonesia: [www.pmi.or.id](http://www.pmi.or.id)

selain menggantikan rumah sakit lama yang sudah dalam kondisi yang memprihatinkan, namun juga memiliki tujuan agar umat muslim dan Buddha dapat saling toleransi dan berbaur bersama.

Setelah adanya gerakan awal dari PMI dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah Myanmar, pemerintah Indonesia mulai melakukan tahap awal pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah korban yang terkena dampak konflik. Pada 29 Desember 2016, pengiriman pertama bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia. Pengiriman sebanyak 10 kontainer ini berisi paket-paket bantuan yang terdiri dari paket hygiene kit, paket makanan siap saji, tenda pengungsi, selimut hingga pakaian anak-anak. Pengiriman bantuan tahap awal ini didistribusikan melalui jalur laut yang justru memakan waktu cukup lama. Pengiriman bantuan kemanusiaan pada tahap awal ini dijadikan sebagai langkah perdana oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Myanmar.

Indonesia terus-menerus mengumpulkan bantuan, tidak hanya dari pemerintah namun juga dari masyarakat, organisasi masyarakat, dan individu seperti para pengusaha-pengusaha. Adanya rasa kepedulian yang tinggi terhadap korban dari tragedi kemanusiaan di wilayah negara bagian Rakhine membuat semakin cepatnya pengumpulan bantuan dana dari para donatur yang membuat pemerintah Indonesiamelancarkan pengiriman bantuan tahap kedua. Pada 13 September 2017, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap kedua, namun kali ini ditujukan kepada para pengungsi yang berada di kamp pengungsian di Cox' Bazar yang terletak di perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar. Pengiriman bantuan tahap kedua ini terdiri dari kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, makanan siap saji, family kit, tangki air, tenda pengungsi, pakaian anak-anak, dan selimut. Pengiriman bantuan kemanusiaan kali ini tidak melalaui jalur laut namun

menggunakan pesawat terbang yakni 4 pesawat Hercules milik TNI AU yang lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma.<sup>7</sup> Tidak berselang lama pada 20 September 2017, pemerintah Indonesia melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan kembali yang ditujukan kepada korban konflik yang berada di wilayah Myanmar khususnya wilayah Rakhine. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, paket makanan siap saji, tenda pengungsi, selimut dan sarung, dan tangki air untuk menampung air bersih, serta 1 ton paket obat-obatan. Jika dihitung sejak pengiriman pada tahap awal, pemerintah Indonesia sudah mengirim bantuan kemanusiaan mencapai 78 ton, yang terdiri dari barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dan obat-obatan.

### **C. Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar (AKIM)**

Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar (AKIM) adalah sebuah badan bentukan pemerintah Indonesia yang menggabungkan 11 organisasi masyarakat di Indonesia. 11 organisasi kemasyarakatan di Indonesia seperti Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim-Nahdlatul Ulama (NU), PKPU Human Initiative, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Dompot Perduli Ummat- Daarut Tauhiid, LAZIS Wahdah, Laznas LMI, Aksi Cepat Tanggap, Lazis Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, dan Social Trust Fund- UIN Jakarta. AKIM telah diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 31 Agustus 2017 sebagai bagian dari aksi Indonesia dalam membantu penyelesaian tragedi

---

<sup>7</sup> RI Kirimkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Rohingya. (2017, September). Retrieved Maret 15, 2018, from BBC Indonesia: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)

kemanusiaan di wilayah negara bagian Rakhine. Tujuan dari dibentuknya AKIM adalah untuk membantu krisis kemanusiaan terhadap masyarakat etnis Rohingya di Rakhine.<sup>8</sup>

Pembentukan AKIM oleh pemerintah Indonesia dimaknai sebagai respon nyata atas permasalahan yang terjadi di Myanmar. AKIM juga telah membentuk sebuah program yang disebut HASCO atau *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (Bantuan Kemanusiaan untuk Masyarakat yang Berkelanjutan), program ini berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dan pengembangan kapasitas untuk wilayah yang terkena dampak konflik. Program HASCO ini juga memprioritaskan bantuan terhadap 4 elemen dalam masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan *humanitarian relief* (pemenuhan kebutuhan dasar).<sup>9</sup> Program ini menjadi sebuah tindak lanjut dari pemerintah Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar, dan tujuan dari terciptanya program HASCO ini adalah untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang masyarakat yang terkena dampak konflik di wilayah Rakhine secara inklusif dan dilaksanakan selama 2 tahun sejak AKIM diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yakni pada tahun 2017.

Pergerakan AKIM di wilayah Myanmar dalam membantu masyarakat yang terkena dampak konflik telah direalisasikan sejak setelah diresmikannya AKIM yakni pada Agustus 2017 silam. Di akhir tahun 2017, AKIM telah mengumpulkan dana yang mencapai 15 Miliar rupiah yang berasal dari berbagai donatur di Indonesia. Dana yang terkumpul kemudian didistribusikan menjadi berbagai bentuk

---

<sup>8</sup> *Release Resmi Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)*. (2017, September 06). Retrieved February 26, 2018, from dtpeduli: dpu-daaruttauhid.org

<sup>9</sup> *Menu RI Menuju Myanmar Untuk Bertemu State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi*. (2017, September 03). Retrieved Maret 15, 2018, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: www.kemlu.go.id

barang kebutuhan hidup berupa kebutuhan sandang dan pangan, serta paket obat-obatan yang juga didistribusikan menggunakan truk-truk bantuan dari salah satu perusahaan Indonesia yang telah beroperasi lama di Myanmar yakni PT. Comfeed (*Japfa Comfeed Indonesia*) yang selama 18 tahun telah menjalankan bisnisnya di wilayah Myanmar. Selain bantuan sandang-pangan dan obat-obatan, AKIM juga merencanakan pembangunan fasilitas pendidikan yang sudah terealisasi sampai saat ini 6 sekolah, dan tidak hanya dalam pendidikan saja namun pemerintah Indonesia melalui program-program dari AKIM juga berencana untuk mendirikan fasilitas kesehatan dan pelatihan tenaga medis di Myanmar. Melalui program-program yang dikeluarkan oleh AKIM, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus aktif membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine.

#### **D. Peran Pemerintah Indonesia Melalui AKIM**

Badan bentukan pemerintah Indonesia yakni AKIM, menjadi salah satu alat penghubung bagi Indonesia untuk membantu mengatasi permasalahan yang menimpa masyarakat etnis Rohingya di Myanmar. Melalui arahan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, AKIM melakukan tindakan pendekatan terhadap masyarakat Myanmar dan melakukan berbagai dialog untuk lebih mengetahui permasalahan yang telah terjadi serta solusi yang dapat diberikan secara tepat tanpa menimbulkan berbagai pertengkaran ataupun kecaman oleh beberapa pihak. Pendekatan yang dilakukan oleh anggota-anggota AKIM melalui pendekatan kemanusiaan dengan target 4 isu dasar yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan *humanitarian relief* (pemenuhan kebutuhan dasar).

Di bidang pendidikan, AKIM dengan bantuan beberapa pihak seperti PMI dan Pemerintah Indonesia telah membantu pembangunan sekolah bagi masyarakat Myanmar khususnya wilayah negara bagian Rakhine, dan sampai tahun 2017 telah terhitung sudah 6 unit sekolah telah di bantu pembangunannya. Di bidang kesehatan, AKIM berfokus pada penguatan fasilitas-fasilitas seperti memberikan bantuan pendirian klinik-klinik kesehatan dan pembangunan rumah sakit, pemberian ambulan, diadakannya pelatihan keperawatan maupun pendampingan kesehatan, dan pengiriman dokter serta peralatan medis. Dibidang ekonomi, lebih berfokus untuk menghidupkan kembali mata pencaharian bagi masyarakat Myanmar khususnya masyarakat yang terkena dampak dari tragedi kemanusiaan di wilayah negara bagian Rakhine, pemerintah Indonesia melalui AKIM merencanakan pembangunan sebuah pasar, selain memiliki tujuan untuk menambah penghasilan masyarakat juga agar pasar menjadi sebuah tempat berinteraksi antara seluruh masyarakat baik itu dari etnis yang berbeda pasar dapat dijadikan sebagai tempat interaksi tanpa memandang etnis. Sedangkan dalam bidang pemenuhan kebutuhan dasar atau *humanitarian relief*, AKIM masih mengandalkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia. Bantuan kemanusiaan yang disalurkan masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban dari tragedi kemanusiaan dan tindak kekerasan di wilayah negara bagian Rakhine.

Pembentukan AKIM dan pelaksanaan program didalamnya menjadi bagian dari soft diplomacy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan di wilayah negara bagian Rakhine. Soft diplomacy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu cara yang dapat diterima oleh pemerintah Myanmar. Pendekatan inklusif, yang berfokus pada kemanusiaan tanpa memandang status agama maupun etnis menjadi salah satu langkah yang tepat untuk pemerintah Indonesia dalam

menyikapi tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah Rakhine.

### **E. Perbandingan Upaya Pemerintah Indonesia Pada Era SBY dan Jokowi**

Upaya pemerintah Indonesia dalam membantu permasalahan yang terjadi di Rakhine Myanmar telah melalui 2 periode kepemimpinan yakni pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Namun, terdapat beberapa perbandingan dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Rohingya di Rakhine Myanmar, seperti :

- 1) Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah meletusnya konflik di Myanmar, pemerintah Indonesia berulang kali melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar seperti menawarkan bantuan untuk mengirimkan ahli penyelesaian konflik dan kunjungan langsung Jusuf Kalla yang menghasilkan disetujuinya masuknya bantuan ke wilayah konflik Myanmar melalui PMI. Sementara pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah meletusnya konflik pemerintah Indonesia terbilang sedikit lambat dalam mengambil aksinya. Pemerintah Indonesia di masa Jokowi awalnya hanya sebatas mengeluarkan pernyataan-pernyataan tegas, sikap prihatin, dan rasa simpati terhadap para korban konflik tanpa melakukan tindakan aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan baru muncul pada pertengahan tahun 2017 yang diawali dengan pengiriman bantuan kemanusiaan yang sebelumnya telah diusahakan pada masa pemerintahan SBY.
- 2) Untuk masalah penawaran solusi terhadap permasalahan di Rakhine Myanmar memiliki banyak perbedaan di masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Pada masa pemerintahan

SBY, pemerintah Indonesia hanya berhasil untuk menguberikan izin untuk memberikan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah konflik di Myanmar. Sementara pada masa pemerintahan Jokowi, pemerintah Indonesia berhasil menawarkan solusi penyelesaian yang dinamakan “ Formula 4+1” dan berhasil membentuk sebuah badan yang berasal dari gabungan beberapa organisasi yang diresmikan dengan nama AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar) yang dijadikan sebagai alat penghubung untuk membantu penyelesaian masalah di Rakhine Myanmar.

- 3) Peran Menteri Luar negeri menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah Indonesia untuk membantu permasalahan di Rakhine Myanmar. Pada masa pemerintahan SBY, menteri luar negeri yang bertugas pada masa itu ialah Marty Natalegawa. Di setiap kesempatannya menghadiri forum-forum internasional seperti OKI, PBB, dan ASEAN, menteri luar negeri Marty selalu berusaha menyinggung permasalahan yang terjadi di Rakhine Myanmar untuk dijadikan topik pembahasan. Sementara, pada masa pemerintahan Jokowi, Menteri luar negeri Retno Marsudi melakukan berbagai aksi selain menyinggung masalah Rakhine dalam forum internasional, juga melakukan kunjungan langsung ke negara Myanmar untuk memberikan solusi penyelesaian konflik, dan menteri luar negeri Retno Marsudi juga membentuk AKIM yang menjadi bagian dari salah satu alat pendekatan untuk masalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine Myanmar.
- 4) Pemerintah Indonesia pada masa Presiden SBY dan masa Presiden Jokowi sama-sama melakukan *soft diplomacy* untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di Myanmar. Walaupun menggunakan cara dan aksi berbeda dalam pendekatannya, namun masih mengutamakan *soft diplomacy* sebagai langkah tindak lanjutnya. Mengingat sejarah hubungan baik yang telah dijalin oleh negara Indonesia dan negara Myanmar, pemerintah Indonesia

juga lebih ekstra hati-hati dalam setiap langkah yang akan diambil dalam menyikapi permasalahan di Myanmar demi menjaga hubungan keduabelah pihak.